

ATURAN ZONA 300 M MUNCULKAN KEKHAWATIRAN

Banyak Calon Siswa Tak Lolos Verifikasi

YOGYA (KR) - Kekhawatiran orang tua atau calon siswa baru soal adanya aturan zona 300 meter dari sekolah bakal mengurangi kuota zonasi dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK ternyata tidak terbukti. Sampai hari ketiga, yang mendaftar lewat zona 300 meter masih sedikit.

Bahkan, berdasarkan data yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY calon siswa baru yang mendaftar melalui jalur tempat tinggal 300 meter ada 591 siswa untuk semua sekolah di DIY.

Dari jumlah tersebut sebanyak 258 orang mengalami penolakan karena tidak lolos tahap verifikasi. Sementara yang masih proses verifikasi ada 148 orang dan 185 orang dinyatakan memenuhi syarat.

"Awalnya sempat muncul kekhawatiran bahwa adanya seleksi zona 300 meter dari sekolah akan mengurangi kuota lewat jalur zonasi. Tapi kalau dilihat, sampai Rabu (15/6) siang yang mendaftar tercatat baru 591 calon siswa, kekhawatiran itu tidak terbukti. Karena sampai hari ketiga ini yang daftar zona 300 meter itu sangat sedikit," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu pendidikan Disdikpora DIY, Suci Rohmadi di Kantor Disdikpora DIY, Rabu (15/6).

Suci mengatakan, untuk bisa lolos calon siswa harus bisa memenuhi sejumlah

persyaratan yang sudah ditentukan. Seperti mengupload foto, membuat surat pernyataan yang ditandatangani kepala keluarga sampai adanya verifikasi langsung dari sekolah dengan melibatkan RT/RW. Berdasarkan laporan yang masuk kebanyakan calon siswa yang tidak lolos verifikasi disebabkan karena tak memenuhi persyaratan. Sebab, setelah dilakukan pengecekan petugas dari sekolah rupanya ada calon siswa yang rumahnya tidak masuk dalam radius 300 meter dari sekolah yang dituju. Saat ini, Disdikpora DIY juga tengah mengantisipasi modus numpang Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab demi mengahkali sistem zonasi.

"Selama ini ada orangtua yang menitipkan anak pada kerabat atau teman yang berdomisili tidak jauh dari sekolah favorit. Nanti akan kami cek di Kartu Keluarga (KK) ada namanya dan tinggal di situ sudah satu tahun atau belum. Seandainya tertera di KK, tapi ia tidak tinggal di situ secara otomatis ti-

dak lolos,"ungkapnya.

Lebih lanjut Suci menambahkan, dalam pelaksanaan seleksi PPDB Disdikpora DIY selalu mengedepankan kejujuran. Untuk itu Disdikpora DIY akan meminta wali murid untuk membuat surat keterangan bermeterai yang menyatakan bersedia diproses secara hukum atau dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan manipulasi data. Surat pernyataan itu juga diminta ditandatangani oleh ketua RT dan RW setempat untuk membuktikan bahwa calon siswa memang berdomisili di wilayah itu.

"Apabila saat dilakukan pengecekan ke rumah ternyata anaknya tidak tinggal di situ? sekolah silakan menolak walaupun jaraknya di dalam 300 meter. Jadi nanti yang bersangkutan bisa mendaftar lewat zonasi," jelasnya.

Komentar serupa diungkapkan Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya MPd. Menurutnya, meski lokasi rumah dan sekolah 300 tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya calon siswa lolos verifikasi. Memang yang mengajukan cukup banyak tapi tidak secara otomatis semua langsung lolos. Karena salah satu syarat yang ditetapkan ada surat pernyataan dari kepala keluarga yang menyatakan calon siswa tersebut sudah tinggal di tempat itu lebih dari satu tahun.

(Ria)-d

YOGYAKARTA ROYAL ORCHESTRA Gelar 'Concerto Nusantara' di Tebing Breksi



KR-Istimewa

Penampilan Yogyakarta Royal Orchestra dalam konser di Gedung Agung Yogyakarta.

DINAS Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY bekerja sama dengan Yogyakarta Royal Orchestra menggelar Peringatan Hari Musik Sedunia (*World Music Day*), Selasa (21/6) pukul 19.00 di Tebing Breksi, Desa Sambirejo, Prambanan. Acara ini menampilkan pertunjukan musik *full orchestra* bersama Yogyakarta Royal Orchestra dengan mengedepankan tema 'Concerto Nusantara'.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY Dian Laksmi Pratiwi SS MA, peringatan Hari Musik Sedunia ini sekaligus untuk menandai ulang tahun pertama Yogyakarta Royal Orchestra yang diluncurkan 21 Juni 2021 di Pagelaran Kraton Yogyakarta.

Dalam setahun terakhir, Yogyakarta Royal Orchestra telah melangsungkan beberapa kali konser se-



KR-Devid Perman

Dian Laksmi Pratiwi SS MA

perti Konser Launching Yogyakarta Royal Orchestra, Konser Akhir Tahun 2021, serta Konser Yogyakarta Royal Orchestra pada Selebrasi Hari Penegakan Kedaulatan Negara Republik Indonesia, Maret lalu di Gedung Agung Yogyakarta.

Dalam pertunjukan mu-

sik orkestra 'Concerto Nusantara', menurut Dian, Yogyakarta Royal Orchestra melibatkan 100 musisi yang terdiri Abdi Dalem, mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dan siswa Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta. Pada pertunjukan kali ini Yogyakarta Royal Orchestra menampilkan kolaborasi musik orkestra dengan karawitan, dan repertoar lagu-lagu Nusantara.

Satu hal yang berbeda dari konser sebelumnya, pada Peringatan Hari Musik Sedunia tahun ini tampil pula solois violin internasional Iskandar Widjaja beserta solois sasando dan saluang, untuk ikut kolaborasi dalam beberapa repertoar yang disajikan dalam konser Yogyakarta Royal Orchestra.

Repertoar yang dibawakan yaitu Ladrang Gati Mardowo Pelog 6, Lagu Ma-

lam Baiko (artis saluang), Lisoi (sextet vocal), Ofa Langga Soba Soba (artis sasando), Concerto Nusantara (solis violin Iskandar Widjaja) dan Ladrang Mrak Ati Pelog barang.

Dian mengatakan, peringatan Hari Musik Sedunia yang baru pertama kali diadakan Dinas Kebudayaan DIY ini, dimaksudkan untuk mengapresiasi hari peringatan di tingkat internasional. "Fokus kegiatan kita itu ada tiga yaitu Yogya untuk Yogya, Yogya untuk Indonesia dan Yogya untuk Dunia," kata Dian.

Pergelaran Yogyakarta Royal Orchestra 'Concerto Nusantara' terbuka untuk masyarakat umum. Undangan terbatas dapat diperoleh secara gratis di Kantor Dinas Kebudayaan DIY, Jalan Cendana No 11, mulai hari ini, Kamis (16/6) pada jam kerja. (Dev)

ANGGARAN WABAH PMK RP 4,4 TRILIUN

Ombudsman Minta Pemerintah Transparan

JAKARTA (KR) - Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman RI meminta Pemerintah agar transparan mengenai anggaran senilai Rp 4,4 triliun untuk mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ratusan ribu ternak sapi di Indonesia.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya belum menemukan dasar dari keputusan ataupun rencana kerja tersebut. "Setelah kami telusuri, hasil epidemiologi belum ada, pemeriksaan dan pengujian baru di daerah tertentu saja, kok bisa membuat perencanaan seperti ini?" ujar Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/6).

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian pada 13 Juni 2022 lalu, parlemen setuju terhadap usulan Pemerintah terkait kebutuhan anggaran tahun ini untuk penanganan penyakit mulut dan kuku senilai Rp 4,4 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk vaksin, obat-obatan, disinfektan, penggantian ternak mati, dan operasional pendukung lainnya.

Dalam upaya menangani penyakit itu, Kementerian Pertanian juga mengambil

langkah kebijakan impor vaksin bivalen dari Prancis sebanyak 3 juta dosis yang akan disalurkan secara bertahap.

Lebih lanjut Yeka mengaku ironis bila kondisi darurat ini justru dibumbui dengan kepentingan-kepentingan yang tidak patut. Ia pun mempertanyakan alasan Pemerintah yang mengimpor vaksin dari Prancis. "Ombudsman mendesak keterbukaan dalam proses ini. Mengapa kita harus mengimpor vaksin dari Prancis? Mengapa harus bivalen?" kata Yeka.

Ombudsman menduga ada kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum oleh pejabat otoritas veteriner, kepala daerah, dan Menteri Pertanian dalam mengendalikan serta menanggulangi penyakit hewan, sehingga meningkatkan angka penyebaran penyakit mulut dan kuku di Indonesia.

"Pemerintah mempunyai kewajiban hukum dalam melindungi hewan ternak. Lambannya Pemerintah dalam penanganan dan pengendalian PMK sama artinya dengan pengabaian kewajiban hukum dalam melindungi hewan ternak," pungkas Yeka.

(Ant)-d

PIALA PRESIDEN 2022

Persikabo Hidupkan Peluang Lolos

MALANG (KR) - Peluang lolos Persikabo 1973 dari fase penyisihan Piala Presiden 2022 menyala. Pada laga kedua Grup D di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Rabu (15/6), Persikabo sukses memetik kemenangan 1-0 atas PSM Makassar.

Gol kemenangan Persikabo dileakkan Ryan Kurnia melalui titik penalti pada masa *injury time*. Persikabo kini mengoleksi tiga poin dan tersisa satu pertandingan melawan Arema FC pada Minggu (19/6) yang jadi laga penentuan untuk lolos ke delapan besar. Sedangkan PSM menghadapi Persik Kediri pada laga terakhirnya di penyisihan grup.

Menghadapi PSM, Persikabo tampil agresif mengingat kemenangan jadi harga mati untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Persikabo

mendapat peluang menit kelima. Namun, sepakan Lucky masih melambung di atas mistar gawang PSM yang dikawal M Reza.

PSM tak tinggal diam dan merespons cepat. Serangan di sisi sayap jadi kekuatan PSM. Sembilan menit laga berjalan, Wiljan Pluim hampir membawa PSM unggul. Menyambut sepak pojok Rasyid Bakrie, Pluim melepaskan sentekan namun masih terlalu pelan dan dapat diamankan Diky, penjaga gawang Persikabo.

Peluang emas kembali didapat Persikabo melalui Gustavo Tocantins menit 14. Lepas dari jebakan *offside*, Tocantins tinggal berhadapan dengan kiper PSM. Sayang, sentekan pemain asal Brasil tersebut dapat ditepis M Reza. Kedua tim silih berganti menebarkan ancaman di sisa laga. Yakob

Sayuri mengancam jala Persikabo dengan tendangan keras usai melewati dua pemain lawan. Tapi tembakan-nya masih bisa dijangkau Diky. Hingga babak pertama usai, skor imbang tanpa gol tak berubah.

Babak kedua, Persikabo membuat kejutan. Gustavo Tocantins mencetak gol saat laga berjalan satu menit. Tapi golnya dianulir wasit karena dianggap melakukan pelanggaran lebih dulu sebelum mencetak gol.

Saling serang pun terus terjadi setelahnya. Persikabo mendapatkan hadiah penalti dua menit sebelum laga usai setelah Gustavo Tocantins dilanggar di dalam kotak penalti. Ryan Kurnia yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses menuntaskan tugas. Pertandingan pun berakhir 1-0 untuk kemenangan Persikabo. (Yud)-d

ESTIMASI KEBERANGKATAN HAJI

Pembagi Gunakan Kuota Tahun Terakhir

JEDDAH (KR) - Daftar tunggu ibadah haji yang tersaji dalam aplikasi Haji Pintar atau website Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menunjukkan data estimasi keberangkatan yang semakin lama. Beberapa provinsi bahkan masa tunggu-nya lebih dari 90 tahun.

Kasubdit Siskohat Ditjen PHU Hasan Afandi menjelaskan, mundurnya estimasi keberangkatan haji tersebut disebabkan bilangan pembagi daftar tunggu-nya didasarkan pada kuota haji tahun berjalan.

"Estimasi keberangkatan selalu menggunakan angka kuota tahun terakhir sebagai angka pembagi. Ta-

hun ini kebetulan kuota haji Indonesia hanya 100.051 atau sekitar 46% dari kuota normal tahun-tahun sebelumnya," terang Hasan Afandi yang saat ini tengah bertugas sebagai Kabid Siskohat di Kantor Urusan Haji Jeddah, Rabu (15/6).

Menurut Hasan, sebelum ada kepastian kuota penyelenggaraan haji 1443 H pada pertengahan Mei 2022, bilangan asumsi yang digunakan sebagai bilangan pembagi masih menggunakan kuota berdasarkan MoU penyelenggaraan haji 2020 (pada akhirnya ada kebijakan membatalkan keberangkatan karena pandemi Covid-19), yaitu 210 ribu. Sejak

ada kepastian, kuota haji 1443 H adalah sekitar 100 ribu, maka bilangan pembaginya mengalami penyusutan.

"Hal inilah yang secara otomatis menyebabkan estimasi keberangkatan semakin lama. Sebab, ketika kuota turun, otomatis estimasi keberangkatan akan naik," jelasnya.

Estimasi ini akan terus berjalan sampai adanya kepastian kuota haji pada tahun 1444 H/2023 M. Jika kuota kembali normal, misalnya kembali ke 210 ribu atau bahkan lebih, estimasi keberangkatan akan mengalami penyesuaian. (Ati)-f

KPK MINTA PENJABAT KEPALA DAERAH

Hindari Korupsi, Benahi Sistem Pemerintahan

JAKARTA (KR) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan berharap agar para pejabat kepala daerah dapat membenahi sistem pemerintahan daerah menjadi lebih transparan dan terhindar dari praktik koruptif seperti suap.

"Penjabat kepala daerah, mari, dua tahun ini cukup banget. Kami berharap kasus suap ini selesai. Mari berintegritas. Perizinan yang suapnya banyak, selesaikan dengan elektron-

ik. Kalau Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP-nya belum full elektronik, dorong supaya elektronik," kata Pahala.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberi paparan dalam Webinar 'Menjaga Netralitas Birokrasi dalam Era Penjabat Kepala Daerah' yang disiarkan dari Jakarta, Rabu (15/6). Pahala mengatakan, pihaknya sangat berharap penjabat kepala daerah dapat mengatasi permasalahan suap yang acapkali terjadi di tingkat

Pemerintah Daerah. Adapun tiga permasalahan yang menjadi sorotan Pahala adalah permasalahan perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta perkara jual-beli jabatan.

Meskipun kasus penyuapan menempati jumlah perkara paling tinggi, yakni 64 persen, Pahala mengungkapkan bahwa kasus penyuapan tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perkara perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta jual-beli jabatan. (Ant)-d



KR-Antara/Reno Esnir

TERSANGKA SUAP APARTEMEN: Tersangka kasus dugaan suap untuk pengurusan perizinan permohonan IMB proyek pembangunan Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta, Nurwidhihartana berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/6). Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta nonaktif tersebut diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan permohonan IMB proyek pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah cagar budaya.